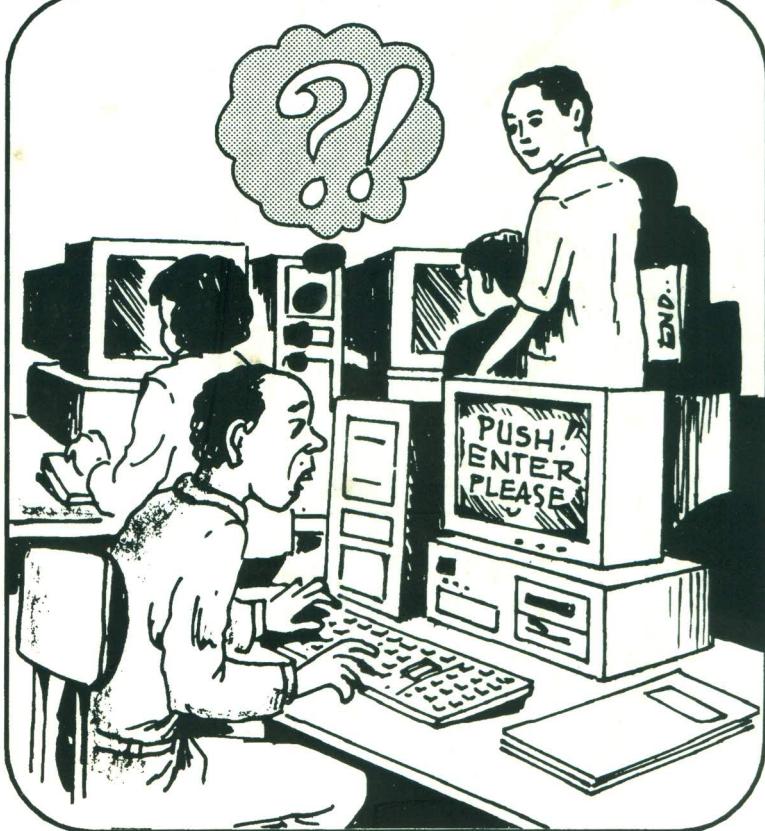




Gita Setra

HIMBAUAN DARI DAN UNTUK LAPANGAN

ISSN : 0854 - 4956





Daftar Isi

GITA UTAMA

- 1 Program PLS yang Diarahkan Untuk Pengentasan Kemiskinan

GITA SELINGAN

- 18 PADU : *Investasi Bagi Kemajuan Bangsa*
- 26 Penilaian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Tahun 1998/1999
- 30 Resonansi : *Ramadhan Sebuah Kenangan*

Penanggungjawab: Kepala BPKB Jayagiri; Pemimpin Redaksi: Drs. Safuri, M.Pd;
Dewan Redaksi: Drs. Mahmud Marua, Drs. Tatang Somantri, Paiman Umar,
Merry Mariam, S.Pd., Apidin Hasanudin MD, Drs. Gunarto, Drs. Mahmud Hidayat,
Sri Wahyuningsih, S.Pd. Illustrator: Endang Djumaryana; Distributor: Parwoto;

Penerbit/Pencetak:

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) JAYAGIRI BANDUNG
Jl. Jayagiri No. 63 Kec. Lembang Kab. Bandung Kode Pos 40391
Telepon 022 - 2786017, Fax. 022 - 2787474

DIPRODUKSI DAN DIEDARKAN TERBATAS DALAM KALANGAN SENDIRI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Tahun 1998/1999



Pengantar

Tak ada seorangpun yang dapat menghambat lajunya waktu, tanpa terasa sudah sampai dipenghujung tahun anggaran 1998/1999.

Tahun anggaran 1998/1999 segera berakhir dan kita bersiap-siap menyongsong tahun anggaran 1999/2000 dengan segala upaya yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

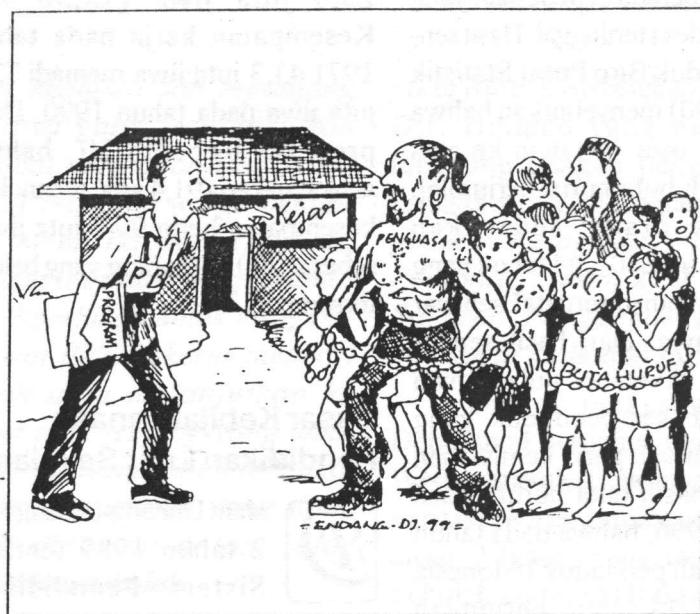
Penerbitan Gita Setra Edisi Desember 1998 Tahun XVI No. 52 berkenaan dengan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, kami sajikan pula tulisan dengan judul PADU (Pengembangan Anak Dini Usia) yang merupakan investasi bagi kemajuan bangsa. Berita lainnya yang dapat anda baca Penilaian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tahun 1998/1999.

Seiring itu pula Keluarga Besar BPKB Jayagiri Bandung mengucapkan "Selamat Idul Adha 1419 H".

Semoga sajian Gita Setra edisi 52 ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum.

Redaksi



Program Pendidikan Luar Sekolah Yang Diarahkan Untuk Pengentasan Kemiskinan

Oleh : H. Soedijarto

Pendahuluan

Tugas yang diemban oleh sektor pendidikan luar sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya

kan penghasilan, mengembangkan minat pribadi agar mampu menghadapi perubahan tantangan dan peluang masa depan.

Pada Repelita I sebanyak 41 juta orang (40 %) penduduk Indonesia menyandang buta huruf,

manusia yaitu membebaskan penduduk dari buta huruf dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat bodoh dan miskin pengetahuan keterampilan bermatapencaharian sehingga mereka mampu memperbaiki kualitas hidup, meningkat-

majoritas berada di pedesaan yang tergolong desa tertinggal. Hasil sensus penduduk Biro Pusat Statistik (BPS, 1990) menyebutkan bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih buta huruf berjumlah 21,3 juta orang; sedangkan penduduk usia 10 – 44 tahun yang masih buta huruf tercatat sebesar 5,7 juta jiwa. Dari hasil sensus penduduk diketahui pula bahwa sebagian besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ternyata masih buta huruf. Hasil Susenas 1996, bahwa pada tahun 1996 jumlah penduduk Indonesia usia 10 – 44 tahun berjumlah 117.887.657 jiwa, sedangkan jumlah penduduk buta huruf usia 10 – 44 tahun ada sebanyak 6.903.272 jiwa (5,86 %).

Pada tahun 1969/1970 dari setengah jumlah penduduk 70 juta hidup dalam kemiskinan absolut. Tahun 1976 masih ada 54,2 juta jumlah penduduk yang miskin absolut. Pada tahun 1990 (BPS, 1990) jumlah penduduk miskin berjumlah 27,2 juta jiwa (15,14 %) dan pada tahun 1993 masih terdapat

25,9 juta jiwa (13,56 %). Kesempatan kerja pada tahun 1971 43,3 juta jiwa menjadi 73,9 juta jiwa pada tahun 1990. Data proyeksi Repelita VI, bahwa angkatan kerja 91,4 juta, sedangkan kesempatan kerja 90,7 juta jiwa, sebesar 700.000 orang yang belum terserap.

Dasar Kebijaksanaan Pendidikan Luar Sekolah

 alam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Penndidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional terdiri dari dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendnidikan luar sekolah terdiri atas satuan 1) keluarga, 2) kelompok belajar, 3) kursus dan 4) satuan pendidikan sejenis.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 menetapkan bahwa Pendidikan Luar Sekolah bertujuan untuk; *1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang*

Program Direktorat Jenderal Dikmaspora

sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, 2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi, 3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga yang menanggulangi kebodohan dan kemiskinan adalah Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dir. Dikmas) dan Direktorat Pembinaan Generasi Muda (Dir. Binmud). Program Dir. Dikmas yang berkaitan dengan usaha pengentasan kebodohan dan kemiskinan sebagai berikut : 1) *Pemberantasan Buta Huruf (PBH)*, 2) *Paket A Setara SD*, 3) *Paket B Setara SLTP*, 4) *Kelompok Belajar Usaha*, 5) *Beasiswa (Magang/Kursus)* dan 6) *Latihan Keteram-*

pilan Wanita. Sedangkan program Dir. Binmud yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan adalah program: 1) *Program Pelatihan Pemuda Produktif*; dan 2) *Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP - 3)*.

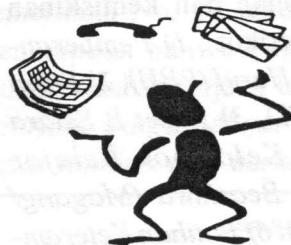
Dalam pelaksanaannya Depdikbud berupaya agar setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3 tahun. Program pendidikan luar sekolah dilakukan melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Pada awal PJP I, kurang dari 50% anak usia SD yang dapat bersekolah. Pada akhir PJP I telah mampu diingkatkan menjadi di atas 95% dan bahkan pada saat itu dimulai wajib belajar 9 tahun. Pada saat ini jumlah murid SLTP telah mencapai lebih dari 8 juta atau merupakan sekitar 60% dari penduduk usia 13 – 15 tahun. Namun demikian, keberhasilan pendidikan dasar belum

merata pada seluruh daerah di Indonesia serta masih adanya murid putus sekolah. Oleh sebab itu pendidikan luar sekolah yang berupa Kejar Paket A (setingkat SD) dan Kejar Paket B (setingkat SLTP) masih diperlukan masyarakat miskin dan untuk menuntaskan wajar 9 tahun.

Untuk memperkuat kemampuan masyarakat Indonesia disamping program Wajib Belajar Pendidikan Pendidikan Dasar 9 tahun, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan program pemberantasan Tiga Buta (buta Aksara Latin dan Angka, buta Bahasa Indonesia dan buta Pendidikan Dasar). Dengan program Operasi Bhakti ABRI Manunggal Aksara (OBAMA) diharapkan penduduk usia 10 – 44 tahun pada akhir Pelita IV akan bebas buta aksara dan pada akhir Pelita VII seluruh bangsa Indonesia akan bebas buta aksara.

Ada dua jenis program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan dalam

pemberantasan kebodohan dan kemiskinan, *yang pertama*, Program Tidak Langsung yang intinya adalah kegiatan program yang berupaya untuk penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan kondisi yang mendukung upaya penanggulangan kebodohan dan kemiskinan dengan memberikan bekal pengetahuan dasar, *yang kedua*, Program Langsung yang intinya adalah kegiatan program yang berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin yang tidak memiliki pengetahuan keterampilan bermata pencarian yang tetap dan layak sehingga mereka mampu memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan penghasilan, mengembangkan minat pribadi serta mampu menghadapi perubahan, tantangan dan peluang.



Program Direktur Jenderal Diklusepora

1. Program Yang Bersifat Langsung

Program Pemberantasan Buta Aksara

rogram ini pada hakikatnya adalah membela jarkan warga masyarakat yang belum pernah sekolah atau buta huruf, sehingga mereka mampu mengembangkan diri sebagai warga negara yang produktif sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemberantasan buta aksara secara intensif dilaksanakan mulai tahun 1978, melalui Kejar Paket A dengan sasaran penduduk buta huruf usia 10 – 44 tahun. Bahan belajar pokok yang digunakan adalah buku Paket A₁ – A₁₀₀ yang isinya memuat tentang HAMIPOLEKSOSBUD-KAM. Proses belajarnya ditempuh melalui kelompok belajar, rata-rata 10 – 20 orang per kelompok.

Selama pelaksanaan program, ternyata program pem-

berantasan buta huruf memiliki dampak yang sangat luas dilaksanakan oleh UNESCO PROAP, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sampel ternyata menunjukkan bahwa penyelenggaraan program pemberantasan buta huruf memiliki dampak langsung terhadap;

- peningkatan penghasilan masyarakat,
- kesadaran untuk mengikuti program keluarga berencana, sehingga program KB berhasil,
- kesadaran untuk menyekolahkan anak minimal tamat SD,
- penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan,
- naiknya kualitas gizi masyarakat,
- meningkatkan usia harapan hidup,
- kesadaran partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan,
- kesadaran masyarakat terhadap sikap demokrasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan mempercepat penuntasan pelaksanaan program, sejak tahun 1994 program pemberantasan buta

aksara dilaksanakan melalui Operasi Bhakti Manunggal Aksara, yaitu melalui kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Mabes ABRI, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya disamping itu untuk tahun-tahun berikut akan dilaksanakan program pemberantasan buta aksara fungsional, dimana dalam proses belajar mereka mempelajari substansi keterampilan yang dibutuhkan oleh warga belajar, sehingga setelah mereka belajar dalam program PBH, mereka merasakan ada manfaat yang berarti dalam kehidupannya, seperti keterampilan mata pencaharian-

an yang berguna untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Disamping hasil secara kualitatif seperti tersebut di atas, dengan penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara juga diperoleh hasil kuantitatif, yaitu jumlah penduduk buta huruf terus menurun, dari sekitar 39% pada tahun 1971 (usia 10 tahun ke atas)



menjadi sekitar 12,6% pada tahun 1996.

Program Kelompok Belajar Usaha

rogram ini pada hakekatnya adalah membela-jarkan warga masyarakat yang tergolong miskin, ber-pendidikan rendah dan belum memiliki keterampilan sebagai bekal mencari nafkah.

Dalam pelaksanaan program, dibentuk kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 5-10 orang. Pertama-tama mereka dilatih di bidang keterampilan tertentu sesuai dengan pilihannya. Setelah mereka selesai mengikuti pelatihan mereka diberikan dana belajar usaha rata-rata sekitar Rp 200.000/kelompok.

Dana ini bukan merupakan dana hibah, akan tetapi merupakan dana berputar atau "*revolving fund*", dengan harapan mereka mempunyai tanggungjawab untuk membantu warga belajar lainnya yang memerlukan bantuan dana belajar usaha.

Keuntungan dari program ini adalah: (1) adanya peningkatan pengetahuan yang disertai dengan peningkatan keterampilan dan pendapatan warga belajar sehingga memberikan kontribusi terhadap penghapusan kemiskinan; (2) meningkatkan kesadaran warga belajar tentang pentingnya pen-didikan bagi keluarganya sehingga mendukung program Wajar Dikdas; (3) tumbuh dan berkembangnya aneka usaha matapencarian yang diusahakan oleh masyarakat.

Program Kejar Usaha dimulai sejak tahun 1983, dan hingga tahun 1996/1997 tercatat sekitar 90.000 Kejar Usaha tersebar di seluruh Indonesia dengan aset dana belajar sekitar Rp 20 miliar. Rencana tahun 1997/1998 akan dibina sebanyak 22.500 orang, dengan anggaran sebesar Rp 1.125 miliar.

Program Magang/Kursus



rogram ini pada hakekatnya adalah membela-jarkan warga masyarakat

usia kerja yang tidak sekolah dan tidak bekerja, berasal dari keluarga miskin sehingga mereka memiliki keahlian di bidang keterampilan tertentu yang dapat diandalkan sebagai sumber nafkah.

Pola penyelenggaraan magang ini ditempuh melalui kerjasama dengan pusat-pusat magang di berbagai bidang keterampilan dengan syarat bersedia belajarkan warga belajar sampai selesai dan mencariakan lapangan kerja dengan penghasilan yang wajar.

Dana magang tiap orang sekitar Rp 200.000,- yang diberikan pada pusat magang untuk transport peserta, pembelian alat dan bahan.

Keuntungan yang diperoleh dari program magang ini adalah; (1) terjalinnya kemitraan antara lembaga pendidikan dengan perusahaan; (2) dengan pendidikan yang tidak terlalu lama menghasilkan lulusan yang siap kerja; (3) menunjang program penghapusan kemiskinan.

Sampai tahun 1996/1997 sekitar 94.996 orang telah selesai ikut magang. Rencana tahun 1997/1998 akan dimagangkan sebanyak 7.250 orang dengan anggaran sebesar Rp 1.450 milyar.

Program Latihan Keterampilan Wanita



akekat program ini ialah membelajarkan wanita usia produktif, berkeluarga, nganggur, berpendidikan rendah dan miskin, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan berusaha yang dapat digunakan untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Seperti halnya program Kejar Usaha, mereka juga terlebih dahulu dilatih di bidang keterampilan tertentu. Setelah mereka selesai dilatih diberikan dana belajar untuk mengusahakan keterampilan yang telah mereka pelajari/miliki itu. Sampai dewasa ini tercatat sekitar 20.000 wanita telah dilatih, diberikan dana belajar serta telah mengusahakan mata pencaharian.

Keuntungan dari program ini ialah; (1) meningkatkan kemampuan wanita di bidang keterampilan tertentu sehingga mereka mampu bermata pencaharian; (2) membantu pendapatan keluarga atau melengkapi penghasilan suami; (3) wawasan pendidikan untuk keluarganya meningkat; (4) waktu luang terbatas karena kesibukan meningkat dalam mengelola usaha sehingga memberi kontribusi terhadap penghapusan kemiskinan.

Selama 3 tahun Repelita VI telah diberikan keterampilan usaha wanita sebanyak 11.670 orang, sedangkan rencana 1997/1998 sebanyak 2.260 orang, dengan anggaran sebesar Rp 0,449 miliar.

Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3)

⦿ Pengertian

SP-3 adalah sarjana yang mampu memecahkan masalah, mempunyai sikap mental kemandirian dan jiwa patriotisme serta

mampu menjadi pionir untuk melakukan terobosan-terobosan di pedesaan dengan meningkatkan profesionalisme dalam mentrasfer ilmu dan teknologinya di pedesaan.

Program SP-3 adalah sebagai sarana pembentukan wirausahawan/pengusaha muda mandiri, memiliki makna strategi dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia di kalangan Generasi Muda dan dapat dipandang sebagai aspek dasar bagi penciptaan Wirausahawan baru di pedesaan.

Hakekat Program SP-3 adalah “upaya memeratakan tenaga terdidik (sarjana)” menjadi kader wirausaha dan penggerak pembangunan di pedesaan serta merubah pola pikir masyarakat untuk menggali potensi desa, meningkatkan produktifitas masyarakat, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja di pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sebagai langkah nyata dari program menghapus kemiskinan.

⦿ Sasaran

Sasaran Program Sp-3 adalah masyarakat yang bermukim di pedesaan yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan penghasilan agar dapat hidup lebih baik. Dari tahun anggaran 1998/1999 (angkatan I) sampai dengan tahun anggaran 1997/1998 (angkatan IX) telah terserap sebanyak 10.140 orang terdiri dari; SP-3 kelompok wirausaha = 8.990orang, SP-3 pedamping IDT=1.150orang.

⦿ Hasil yang telah dicapai (Hasil Evaluasi IPB Bogor)

Hasil yang telah dicapai program SP-3 adalah :

Aspek Usaha/Wirausaha

Jenis usaha produktif, sebesar 75,3% usaha produktif SP-3 adalah dibidang pertanian, 13,7% di bidang jasa dan 10,9% di bidang industri. Sebanyak 53,7% usaha produktif SP-3 merupakan jenis usaha/kegiatan yang relatif baru dan memiliki prospek ekonomi yang baik. Dibanding skala usaha masyarakat setempat, sebanyak

84,2% skala usaha SP-3 dinilai biasa dan hanya 19,4% yang dapat digolongkan memiliki skala usaha yang relatif cukup besar dan sisanya (12,9%) bahkan dinilai sangat kecil sekali.

Pelaksanaan Usaha Produktif

Sebesar 54,4% usaha produktif SP-3 menggunakan modal dari proyek/program. Sebanyak 27,9% telah menggunakan bantuan modal dari keluarga dan sedikit sekali (kurang dari 2%) yang telah menggunakan jasa perbankan untuk perluasan usaha, sebesar 87,9% SP-3 mempunyai aset usaha antara 2 – 4 juta dan 12,1% di atas 5 juta. Sebanyak 61,2% usaha produktif SP-3 memiliki prospek yang baik yang dapat lebih berkembang atau dikembangkan. Sebanyak 66,2% usaha SP-3 telah melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja atau mitra kegiatan. Sebesar 85% SP-3 telah membina sebanyak 1 – 5 Kelompok Usaha (KU) dan 14% lainnya memiliki binaan lebih dari 5 kelompok

masyarakat. Sebanyak 67% kelompok masyarakat binaan SP-3 mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar dibanding pendapatan mereka sebelumnya.

Aspek Penggerak Masyarakat

Secara keseluruhan, keberadaan SP-3 di pedesaan dianggap bermanfaat oleh 76% penduduk/masyarakat. Sebesar 76,4% kegiatan SP-3 di dalam menggerakan masyarakat dianggap bermanfaat dan karena itu sebanyak 59% penduduk mengharapkan SP-3 tetap tinggal di desa mereka (walaupun kontrak telah berakhir). Kegiatan sosial SP-3 lebih banyak di bidang kemasyarakatan (88,1%) dibanding kegiatan untuk pembangunan fisik (57,6%). Jenis kegiatan kemasyarakatan yang ikut dilakukan oleh SP pembangunan fisik (57,6%). Jenis kegiatan kemasyarakatan yang ikut dilakukan oleh SP-3, yaitu kegiatan keagamaan (13,1%), gotong royong/kerja bakti (12,9%), olahraga (11,8%), PKK (11,3%),

Karang Taruna (10,8%), Penyuluhan (9,6%), KB (6,6%), Tutor Kejar Paket A dan B (6,1%), Organisasi (5,5%), Program Wajar Dikdas (4,3%), Koperasi (2,3%), Arisan (2,3%), Bank Desa (1,3%), Pramuka (0,75%), Ritual dan Selamatan (1,5%). Sifat kegiatan kemasyarakatan dari SP-3 bersifat rutin (28%), terprogram tetapi tidak rutin (53,2%) dan insidentil (18,3).

Pelaksanaan Kegiatan

SP-3 melakukan pendekatan untuk menggerakan masyarakat melalui cara langsung ke masyarakat melalui cara langsung ke masyarakat (45,3%), aparat desa (33,7%) dan kader-kader masyarakat (30%). Sebanyak 81% SP-3 telah berhasil membentuk kader penggerak masyarakat sebanyak 10 – 15 orang per desa dan 19% untuk lebih dari 25 orang per desa. Bentuk keterlibatan masyarakat/kader merupakan kombinasi partisipasi tenaga, dana, dana bahan (68%), tenaga saja (25%), dana/natura (3%). Instansi yang telibat dalam kegiatan kemasyarakatan

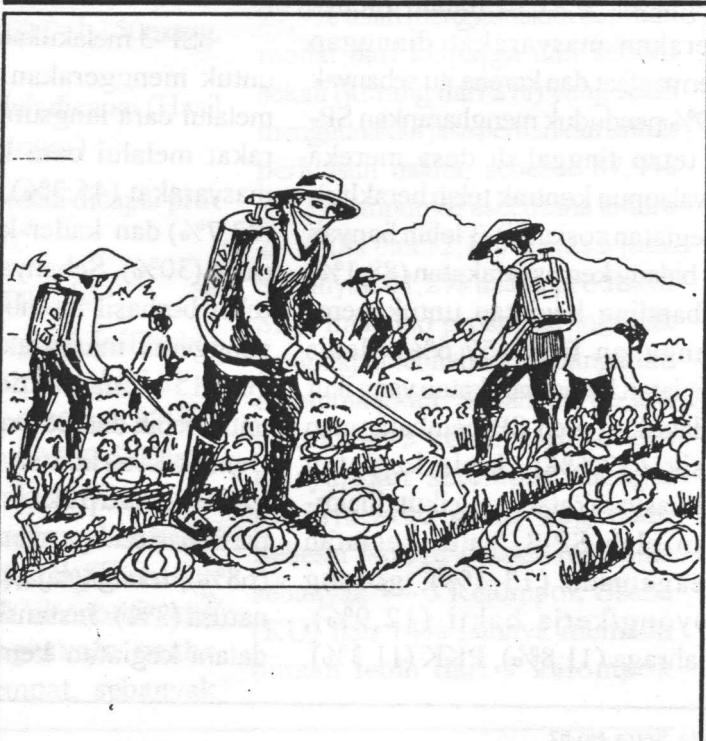
yang dirintis oleh SP-3 ialah aparat desa (34,1%), kelompok masyarakat (25,2%), Pemda/Dinas terkait (21,5%), perseorangan/anggota masyarakat (17,8%) dan lainnya (1,5%).

Sumber Dana

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan kemasyarakatan adalah penduduk (30%), SP-3 (26,2%), kas desa (23,9%), Pemda / Dinas terkait (8,5%), tokoh masyarakat/tomas (5,4%), pengusaha (3,9%) dan sumber dana lainnya (2,3%). Keterlibatan

masyarakat dalam kegiatan SP-3 karena diimbau oleh pimpinan desa dan SP-3 (58,2%), keinginan sendiri (38,0%) dan karena terpaksa (3,8%).

Program SP-3 untuk tahun anggaran 1996/1997 akan menampung 1.600 orang sarjana, sedang untuk Repelita VII direncanakan sebanyak 15.000 orang sarjana.



Program Kelompok Pemuda Produktif

Pengertian

 Kelompok Pemuda Produktif adalah “seperangkat kegiatan, usaha dan tindakan pembelajaran terhadap sekelompok pemuda yang secara sadar, berencana dan terarah, serta bertanggungjawab mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga dapat mencari dan atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhan pasar (dunia usaha) yang selanjutnya sanggup berwirausaha”.

Hakikat Program Kelompok Pemuda Produktif

 Hakikat program kelompok pemuda produktif adalah suatu upaya memberdayakan potensi sumber daya manusia (pemuda) agar mau dan mampu mengembangkan pengetahuan keterampilan dan sikap yang dapat dijadikan bekal bagi kehidupannya dan turut berpartisipasi

dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya di pedesaan.

Tujuan Program

 program kelompok pemuda produktif bertujuan untuk; mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan mengembangkan sikap disiplin, bertanggungjawab, semangat belajar dan etos kerja, serta kreativitas dalam menumbuhkan sikap kewirausahaan, mengembangkan kepekaan pemuda dalam menggali peluang pasar (dunia usaha) dan mampu memanfaatkannya secara optimal, mengembangkan kemampuan pemuda dalam usaha mendayagunakan sumber daya lokal (dana, tenaga, peralatan, sosial budaya dan sistem nilai) bagi perwujudan program.

Sasaran

 persiapkan pemuda yang memiliki motivasi dan dapat bekerja berkelompok untuk membantu masyarakat agar dapat berusaha

memproduksi barang atau jasa bagi meningkatkan taraf hidupnya.

H a s i l

 rogram ini telah dilaksanakan sejak tahun 1991/1992 sampai dengan sekarang dan telah melatih sebanyak 19.000 orang. Dari jumlah tersebut sebagian telah memperlihatkan hasil dengan membentuk kelompok-kelompok wirausaha pemuda antara lain; di Lembang – Jawa Barat, Padang – Sumatera Barat, Bengkulu, Ujungpandang, Semarang – Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Rencana tahun 1997/1998, akan dibina sebanyak 6.480 orang dengan anggaran biaya sebesar Rp 1,8 miliar.

2. Program yang Bersifat Tidak Langsung

Program Kesetaraan Paket A dan Paket B

Program ini pada hakekatnya adalah membela jarkan anak usia 7 – 15 tahun yang tegolong kurang

beruntung sehingga mampu memiliki pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SLTP).

Dalam penyelenggaraan program kegiatan belajar dilaksanakan dalam bentuk kelompok-kelompok belajar terdiri dari 10 – 40 orang warga belajar. kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SD dan SMP tahun 1994. Program ini disamping diselenggarakan di daerah-daerah yang tergolong sulit dan kurang berkembang, juga dilaksanakan di perusahaan-perusahaan yang pekerjanya ada yang masih dalam usia wajib belajar dan belum memiliki pendidikan dasar 9 tahun.

Keuntungan dari program ini adalah; (1) dapat memberi kesempatan belajar pada anak usia wajar karena berbagai hal tidak sekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan dari SD ke SLTP. Data statistik menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 1,2 juta anak putus SD, lulus SD tidak melanjutkan ke SLTP sekitar 1,5 juta, dan sekitar

450.000 anak putus SLTP, sehingga dengan demikian Program Paket A dan Paket B dapat mensukseskan Program Wajar Dikdas 9 tahun, (2) menekan pertumbuhan kemiskinan baru, karena melalui program ini dapat meningkatkan wawasan untuk dapat hidup lebih maju.

Dalam 3 tahun Repelita VI, untuk program Kejar Paket A Setara SD, telah dibelajarkan sebanyak 233.390 orang, rencana tahun 1997/1998 sebanyak 42.998 orang. Sedang untuk program Kejar Paket B Setara SLTP telah dibelajarkan sebanyak 364.830 orang, rencana tahun 1997/1998 sebanyak 95.540 orang.

Berdasarkan penelitian UT (1995), di Kalimantan Barat bahwa 48 % dari warga belajar yang mengikuti Kejar Paket B sambil bekerja. Menurut orang tua warga belajar (98%), bahwa belajar di Paket B tidak melepaskan pekerjaan dan tidak mengeluarkan biaya.

Program Kursus Diklusemas

Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (Kursus Diklusemas) adalah salah satu lembaga pendidikan luar sekolah yang dibina dan dikembangkan oleh Depdikbud dalam rangka meningkatkan perluasan kesempatan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/ atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kursus Diklusemas yang didirikan, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat dengan azas keswadayaan dan keswadanaan semakin mendapat tempat di masyarakat. Kursus Diklusemas semakin berkembang di masyarakat karena; 1) dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh sekolah, 2) memberikan layanan pendidikan keterampilan untuk usaha mandiri, bekerja dan mengembangkan profesi, 3) dapat memberikan

pendidikan keterampilan bagi remaja putus sekolah, kaum wanita, pencari kerja, dan mereka yang telah menyelesaikan program pendidikan kesetaraan.

Kursus-kursus keterampilan seperti menjahit, memasak, tata rias pengantin, kecantikan dan telah sampai ke daerah Kabupaten dan Kecamatan, bahkan Tim Penggerak PKK Kecamatan telah menjalin kerjasama dengan Kursus Diklusemas untuk melaksanakan kursus keterampilan bagi anggota PKK Desa/Kelurahan dan remaja putri.

Dikmas menyediakan dana beasiswa untuk pemuda putus sekolah dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan dari desa IDT untuk mengikuti kursus keterampilan. Lembaga kursus sendiri melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan cara memberikan beasiswa (kursus gratis) bagi pemuda putus sekolah yang tidak mampu. Rata-rata per tahun mencapai 900 orang. Warga

belajar yang telah selesai dan lulus kursus serta memiliki ijazah nasional dapat usaha mandiri, bekerja bahkan di antaranya ada yang dikelompokkan untuk mengelola usaha bersama.

Jumlah Kursus Diklusemas hingga tahun 1996/1997 telah mencapai 20.000 tersebut di seluruh Indonesia akan terus dibina dan dikembangkan. Program standarisasi, akreditasi dan sertifikasi untuk jenis-jenis kursus yang tekait erat dengan IPTEK dan industri dalam usaha meningkatkan mutu kursus dan penyediaan SDM yang terampil, kreatif, dinamis, dan produktif akan terus ditingkatkan dan diperluas. Program kursus melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu akan terus ditingkatkan.



Penutup

1. Pendidikan merupakan usaha yang sangat strategis untuk meningkatkan daya/kemampuan seseorang, sehingga dapat meningkatkan penghasilan nya . Pendidikan dan latihan tidak saja diperlukan bagi seorang memasuki dunia kerja, tetapi juga bagi pekerja agar dapat tetap bekerja dengan berubahnya IPTEK serta syarat-syarat kerja.
2. Tingkat pendidikan angkatan kerja harus segera dapat ditingkatkan agar mampu dalam produktifitas maupun kesempatan kerja dengan tenaga asing. Di samping pendidikan persekolahan, perlu
- 3.

dikembangkan proses sertifikasi yang didasarkan atas kompetensi.



Beban dana yang diperlukan bagi pendidikan dan latihan ditanggung secara bersama yaitu pemerintah dan masyarakat (peserta didik). Dunia usaha sebagai pemakai hasil pendidikan/latihan belum banyak terlibat dalam pelaksanaannya, maka perlu didorong lebih besar lagi partisipasinya. Perlu dikembangkan sistem yang lebih besar baik bagi dunia usaha, baik yang menyangkut keringanan pajak, subsidi dan kemudahan lainnya. ■

PADU :

Investasi Bagi Kemajuan Bangsa

Oleh : Safuri

PADU dan Masa Depan Bangsa



Generasi masa depan bangsa Indonesia yang kita idamkan adalah generasi yang ditandai dengan ciri-ciri; (1) cerdas, kreatif, trampil, terdidik dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) sehat dan berumur panjang dan (3) mandiri dan memiliki akses kehidupan yang layak (Juwono Sudarsono, 1998).

Generasi yang kita idamkan tersebut akan menjadi mimpi, apabila kita tidak membina SDM sedini mungkin, yakni sejak anak usia dini. Dari berbagai studi

ditemukan bahwa program pembinaan anak usia dini dapat memperbaiki prestasi belajar pada saat mengikuti pendidikan, dapat meningkatkan produktifitas kerja dan penghasilan di masa depan, serta mengurangi ketergantungannya kepada pelayanan kesehatan dan sosial (Soedijarto, 1998). Implementasinya adalah bagaimana menyelenggarakan PADU (Pendidikan Anak Dini Usia), agar SDM Indonesia yang demikian besar tidak menjadi beban pembangunan, tetapi menjadi aset utama pendukung pembangunan?

Krisis moral, ekonomi dan politik yang masih berkepanjangan serta beban utang luar negeri yang kita tanggung sekarang, salah satu bukti bahwa SDM kita belum mampu menghadapi tantangan

global dan regional serta mengelola SDA yang demikian kaya sebagai jamrut di Khatulistiwa.

Pembinaan dan pendidikan anak sedini mungkin merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakan, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan perkembangan anak di usia 0 – 8 tahun sangat menentukan mutu hasil belajar dan perjalanan hidup seseorang selanjutnya. Hasil studi juga menemukan bahwa 50% kemampuan kognitif seseorang telah terbentuk pada usia 4 tahun. Dalam kaitan ini, maka perlunya intervensi terhadap perkembangan anak sejak dini yakni mengenai; (1) kesehatan, (2) nutrisi dan (3) rangsangan intelektual dan emosional.

Judith Esans (Soedijarto, 1998) membedakannya dalam empat tahapan; 0–1 tahun, 1–3 tahun, 3–6 tahun dan 6–8 tahun. Masing-masing tahapan tersebut memiliki kekhasan dalam perkembangannya, sehingga diperlukan intervensi berupa kebutuhan dasar yang berbeda pula.

Beberapa pertimbangan perlunya diselenggarakan PADU, menurut **Soedijarto** (1998) adalah:

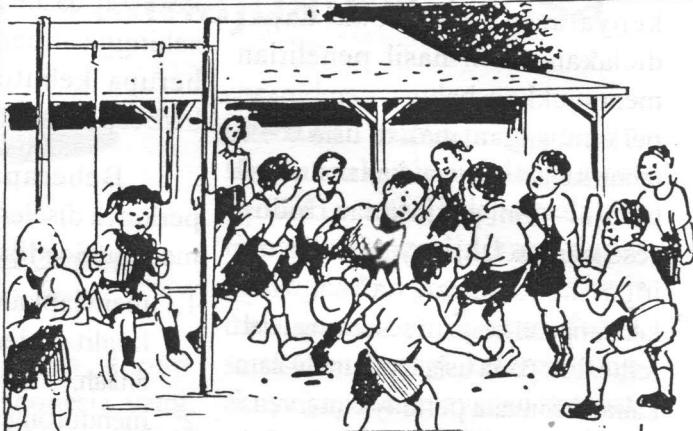
1. menyiapkan SDM yang berkualitas dengan pendekatan ilmiah;
2. mendorong “*economic return*” yang tinggi, oleh karena rendahnya biaya sosial akibat tingginya produktifitas kerja dan tingginya daya tahan;
3. meningkatnya pemerataan dalam kehidupan masyarakat;
4. meningkatkan daya guna investasi di bidang lainnya;
5. menolong para orang tua dan anak-anak itu sendiri.

Program PADU dapat diselenggarakan secara langsung seperti melalui Penitipan Anak,

Pentingnya PADU - Diselenggarakan

ara ahli pada umumnya sepakat bahwa “*anak*” yang dapat dikategorikan sebagai anak usia dini adalah 0–8 tahun. Dalam pelaksanaannya

Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Kanak-kanak, maupun secara tidak langsung seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita dan berbagai kegiatan lain yang diselenggarakan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan maupun institusi lainnya. Tetapi pelayanan program PADU tersebut dirasakan sangat terbatas, data yang ada menunjukkan bahwa pelayanan TK baru menjangkau kurang dari 20% dari anak usia TK, Penitipan Anak dan Kelompok Bermain menjangkau kurang dari 1% anak usia < 5 tahun. Sedangkan pada negara-negara maju angkanya telah



mencapai lebih dari 80% anak telah memperoleh pelayanan PADU.

Data tersebut menunjukkan masih sangat rendahnya perhatian kita terhadap program PADU, baik yang diselenggarakan masyarakat maupun pemerintah. Dalam kaitan ini masing-masing Departemen

melaksanakan sendiri-sendiri sesuai alokasi biaya yang diperolehnya dan Belum dilaksanakan secara terpadu, sehingga pelayannya pun diragukan kualitasnya. Oleh karena masalah PADU menyangkut pelayanan bidang kesehatan, gizi dan rangsangan perkembangan intelektual dan emosional, yang harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai pihak terkait.

Kondisi objektif ini bagi jajaran Ditjen Diklusepora, khususnya BPKB dan SKB, sebagai UPT yang berkompeten terhadap program-program pendidikan luar sekolah hendaknya dapat menjadi target sasaran dalam pengembangan dan pelaksanaan program percontohan di wilayah kerjanya masing-masing. Kerjasama dengan dinas, instansi dan masyarakat setempat merupakan keharusan untuk diwujudkan guna memberikan pelayanan PADU secara lebih paripurna. Adalah keliru apabila penyelenggaraan PADU seperti pada Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak hanya

diartikan bagi pelayanan perkembangan intelektual anak untuk mempersiapkan pendidikan selanjutnya, justru disinilah lemahnya pelayanan PADU di kita, yang kurang memperhatikan aspek kesehatan dan gizi serta pada perkembangan psikologi psikis atau emosional anak (Satoto, 1998), ingat tulisan **Daniel Goleman** mengenai kecerdasan emosional.

Langkah-langkah Penyelenggaraan PADU

(*Implementasi Program Bagi SKB*)



seperti telah dikemukakan di atas, PADU dapat diselenggarakan secara langsung (Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Pendidikan AL-Qur'an dan Taman Kanak-kanak) atau secara tidak langsung (Posyandu, Bina Keluarga Balita, dsb.). Bagi SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dapat dipilih satu atau dua bentuk satuan pendidikan dari PADU tersebut yang

memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan potensi dan karakteristik kelompok sasaran pada masing-masing SKB. Saat ini menurut pantauan penulis baru beberapa SKB di Jawa Barat yang mulai merintis penyelenggaraan Kelompok Bermain. Untuk lebih memantapkan pola penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut atau memberi gambaran kepada SKB yang akan merintis pembentukannya, berikut ini dipaparkan ajuan langkah-langkahnya.

Tahap Penjajakan dan Persiapan

1. Adakan kunjungan dan observasi lapangan ke lokasi penyelenggaraan PADU di daerah masing-masing, seperti ke TK, TPA, Kelompok Bermain, Posyandu dan BKB dengan cara studi eksplorasi atau survey.
2. Catat dan diskusikan hasil kunjungan lapangan, terutama mengenai; (a) Kelompok Sasaran (raw input), (b) masukan sarana (tenaga kependidikan, kurikulum/program belajar, peralatan yang digunakan, pendanaan), (c) proses pembelajaran (jadwal kegiatan, metode, interaksi, penilaian kemajuan), (d) masukan lingkungan, (e) masukan lain (dukungan kebijakan dan tindak lanjut kelompok sasaran setelah selesai mengikuti program), (f) keluaran (kelulusan, atau perubahan kognitif, sikap, keterampilan dan perkembangan apa yang dicapai kelompok sasaran setelah lulus/mengikuti program satuan PADU tsb.), (g) dampak, baik terhadap diri peserta maupun terhadap keluarga dan lingkungan.
3. Rumuskan desain atau rencana kegiatan pembentukan Kelompok Bermain berdasarkan hasil studi eksplorasi tersebut di atas yang dipadukan dengan studi literatur atau bahan-bahan bacaan yang relevan.

4. Identifikasi kelompok sasaran, tenaga kependidikan, kebutuhan peralatan dan nara sumber dari instansi terkait maupun masyarakat.
5. Sosialisasikan gagasan pembentukan Kelompok Bermain dengan dinas/instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, PKK dan pemerintah daerah setempat (perhatikan masukan dan saran-saran mereka).
6. Rumusangkan program pembentukan Kelompok Bermain, atau mengoperasikan rumusan desain (langkah point 3) dilengkapi hasil identifikasi (langkah 5) dan masukan dari instansi terkait (langkah 5).
7. Susun program pelayanan/pembelajaran Kelompok Bermain. Disini diuraikan muatan/isi yang akan diberikan pelayanan/pembelajarannya kepada Kelompok Sasaran, semacam GBPP.
8. Orientasikan tenaga kependidikan dan pelaksana. Materi orientasi berkenaan dengan isi/muatan GBPP, metodologi pembelajaran, penilaian kemajuan, administrasi pendukungan serta pengaturan jadwal belajar.

Tahap Pelaksanaan

9. Pelaksanaan pelayanan PADU, misalnya pada Kelompok Bermain dapat dilakukan 5 atau 6 hari antara pukul 08.00 – 11.00, yang disesuaikan dengan kepadatan materi pelayanan/pembinaan.
10. Penilaian kemajuan pelayanan/pembinaan hendaknya dilakukan secara periodik untuk melihat seberapa jauh perkembangan intelektual, emosial, psikomotorik dan fisik anak. Dalam melaksanakan penilaian dapat melibatkan instansi atau masyarakat yang berkompeten dan hasilnya disampaikan kepada pihak orang tua anak.

Tahap Tindak Lanjut

Sudah etelah anak menyelesaikan program pembinaan misalnya pada Kelompok Bermain, maka pihak penyelenggara (SKB) agar memberikan saran-saran kepada orang tua anak mengenai pendidikan selanjutnya dan lampirkan data hasil penilaian perkembangan anak selama mengikuti program PADU. Kemukakan hal-hal yang dianggap istimewa/kelebihan-kelebihan dan kelemahan/hambatan yang ada pada anak.

Penutup

Kearifan kita dalam menyelenggarakan PADU tidak semata-mata didasarkan pada tuntutan kebutuhan fisik, seperti kebutuhan makan dan minum, tetapi juga memper-

kembangkan intelektual dan emosional anak.

Rentannya pembinaan terhadap anak akan sangat berpengaruh bagi perkembangan hidup dan kehidupannya saat memasuki pendidikan selanjutnya dan

pekerjaannya dimasa datang, tidak kecuali bagi masa depan bangsa.

Adanya kegiatan real menyelenggarakan PADU, seperti Kelompok Bermain,

TK, TPA, BKB dan Posyandu merupakan wujud kepedulian nasib anak dan bangsa di masa depan.

SKB dan BPKB sebagai UPT yang memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, adalah beralasan apabila turut serta mensukseskan PADU. ■

Daftar Pustaka

- Satoto. 1998. **Laporan Studi PADU.** FK Undip Semarang.
- Fauzia Aswin Hadis. 1998. **Dampak PADU Terhadap Perkembangan Aspek Fisik, Intelektual, Sosial dan Emosional.** FP UI Jakarta.
- Setijadi. 1998. **Perspektif Pengembangan Anak Dini Usia Untuk Masa Depan Bangsa.** Jakarta.
- Soedijarto. 1998. **Pembinaan Perkembangan Anak Sejak Dini Sebagai Investasi Untuk Masa Depan.** Jakarta.
- W.P. Napitupulu. 1998. **Peran Pemerintah dan LSM Untuk**

Pengembangan Anak Dini Usia.
Jakarta.

Yuwono Sudarsono. 1998. **Pengarahan Mendikbud pada Seminar Nasional PADU Secara Komprehensif.** Jakarta.





Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (Ditjen Diklusepora) sebagaimana tercantum dalam SK Mendikbud RI Nomor 023/O/97 mempunyai tugas me-

Penilaian
**Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB) Tahun 1998/1999**

Oleh: Drs. E. Dede Suryaman

Pendahuluan



anggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu

laksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, diperlukan peningkatan mutu pelaksanaan program yang ditunjang dengan peningkatan

ketenagaan, sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kinerja SKB setiap tahunnya maka diperlukan penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakannya. Kegiatan penilaian tersebut dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari unsur Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis Ditjen Diklusepora dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB).

Pada tahun 1998/1999 BPKB Jayagiri Bandung diberi tugas dan wewenang untuk menilai kinerja 23 SKB di Jawa Barat sesuai dengan surat Direktur Pendidikan Tenaga Teknis Ditjen Diklusepora nomor 441/E5/LL/98 tanggal 19 Oktober 1998.

Penilaian telah dilaksanakan secara serempak oleh Pamong Belajar BPKB Jayagiri Bandung mulai tanggal 18 s.d. 20 Nopember 1998. Berikut ini kami paparkan pelaksanaan dan hasil penilaian SKB di Jawa Barat.

Kegiatan Penilaian SKB



egiatan penilaian SKB memiliki tujuan mendapatkan informasi tentang kuantitas dan kualitas pelaksanaan program sebagai acuan penentuan dan penilaian kinerja SKB, memberikan ukuran yang benar dan tegas tentang klasifikasi SKB serta mendapatkan informasi/data dampak pelaksanaan pembinaan terhadap SKB, khususnya di Propinsi Jawa Barat, baik yang dilakukan Direktorat Pendidikan Teknis maupun BPKB Jayagiri Bandung.

Adapun sasaran pelaksanaan penilaian adalah 23 SKB yang ada di Propinsi Jawa Barat, dengan aspek penilaian meliputi; kuantitas dan kualitas program SKB berdasarkan pagu sebagai aspek utama, kualitas dan kuantitas aspek pendukung serta kualitas dan kuantitas program SKB yang bersifat swadaya, swadana kerjasama/lintas sektoral sebagai aspek tambahan.

Metodologi penilaian dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, adalah tim penilai langsung mendatangi SKB dan melakukan pengumpulan data dengan cara/ teknik studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Sedangkan secara tidak langsung adalah tim penilai mempelajari dan mengkaji RKT, PKT, laporan-laporan SKB tahun yang sedang berjalan, baik itu laporan tengah tahunan, triwulan dan laporan setiap pelaksanaan program.

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut.

1. Mengadakan pertemuan antara tim penilai dengan Kepala, Kaur TU, PB dan Staf Tata Usaha SKB dimana diinformasikan tentang pelaksanaan penilaian serta berkas-berkas administrasi yang perlu dipersiapkan.
2. Tim penilai melakukan penilaian dengan cara membaca dan mempelajari berkas-berkas kegiatan SKB seperti buku induk warga belajar, daftar hadir tutor dan warga belajar, daftar pengelola, data tempat, sarana prasarana, program belajar, dana belajar dan hasil belajar.
3. Mengkaji masing-masing program berdasarkan 10 komponen Diklusepora. Menilai setiap komponen/variabel berdasarkan kriteria dengan mengacu pada petunjuk teknis masing-masing program Diklusepora, berkaitan dengan aspek pendukung berkas yang dipelajari adalah data ketenagaan, data sarana prasarana, lingkungan SKB, perpustakaan dan kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh SKB.
4. Tim penilai melakukan perhitungan skor seluruh aspek yang dinilai yang terdiri dari kegiatan pokok/utama, pendukung dan tambahan.
5. Menginformasikan hasil penilaian kepada Kepala SKB dan staf SKB sebagai bahan masukan

untuk peningkatan kinerja SKB dimasa yang akan datang.

6. Tim penilai melaporkan hasil penilai kepada panitia.

7. Panitia merekap serta melaporkan hasil penilaian kepada Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis Ditjen Diklusepora melalui Kepala BPKB Jayagiri Bandung.

4 SKB yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara penuh karena masih baru, keempat SKB tersebut adalah; SKB Kodya Bogor, SKB Kodya

Sukabumi, SKB Serang dan SKB

Karawang.

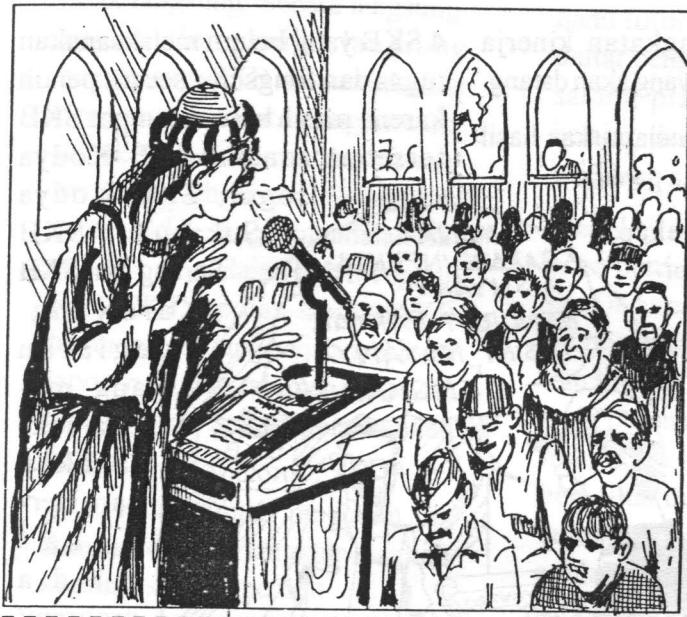
Kegiatan yang mereka laksanakan baru terbatas pada program/kegiatan yang bekerja-sama dengan Penilik dan Seksi Dikmas

yang berada di wilayah kerjanya serta dengan SKB yang sudah lama yang lokasinya berdekatan walaupun demikian nampak juga plus minus dari pelaksanaan penilaian tersebut. ■

Penutup

Secara umum pelaksanaan penilaian tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan prosedur, dari keseluruhan SKB yang dinilai ada





Ramadhan **Sebuah Kenangan**

"Bulan Ramadhan adalah bulan yang agung, penuh berkah, limpahan rahmat dan ampunan dibuka luas atas orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, ibadah puasa adalah separuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai keridhaan-Nya".

Begitulah kata Wak Haji ketika berceramah selepas sholat tarawih di malam sembilan belas. Saya duduk di belakang, bersandar pada tembok masjid, terkantuk-kantuk kekeriyangan. Malam itu yang tarawih banyak

sekali, sampai meluber di halaman masjid. Dan itulah (mungkin) salah satu tradisi kita umat Islam, pelaksanaan ritual tarawih diawal bulan Ramadhan pesertanya banyak sekali, kemudian semakin hari, semakin mendekati hari raya pesertanya semakin sedikit. Keramaian masjid perlahan-lahan

berpindah ke pusat pertokoan untuk berbelanja menyambut datangnya Idul Fitri. Apakah demikian ajaran Islam dalam menyambut Idul Fitri dengan berperilaku konsumtif, atau Idul Fitri lebih merupakan tuntutan budaya yang harus dimeriahkan dengan segala cara (termasuk utang pada koperasi) demi sebuah citra kesuksesan kerja selama setahun ?.

Malam itu dalam ceramahnya, Wak Haji juga menantahkan bahwa puasa juga berperan sebagai senjata ampuh untuk membentuk jiwa yang tahan banting, sabar, istiqomah dan mencerdaskan pikiran sekaligus mengantarkan roh sampai kepada Sang Khaliq. Dan untuk itulah kaum muslimin sangat percaya bahwa pada bulan Ramadhan, Tuhan memberikan kesempatan yang istimewa kepada orang-orang yang beriman. Dengan bahasa sederhana (bahasanya Pamong Belajar), di dalam bulan ramadhan kita wajib “mengerem/mengurangi” kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan dosa kecil (yang sudah jadi kebiasaan kita) misalnya saja, di bulan puasa kita harus

mencegah perkataan kotor, ngomongin orang, tidak berbohong (termasuk demi kelancaran SPJ – Proyek maupun urusan angka kredit). Pada bulan Ramadhan, kita harus memperbanyak shodakoh, wirid, baca AL-Qur'an serta amalan-amalan yang senantiasa berorientasi kepada pendekatan diri kepada Allah. Ucapan, tindakan dan tingkah laku hendaknya kita kontrol demi mendapatkan kenikmatan rohani berupa rahmat dan ampunan-Nya. Di bulan ramadhan, kita kenakan atribut-atribut yang Islami, mulai sarung baru, sajadah baru, baju muslim dan mukena baru, serta kopyah baru, untuk kemudian semua itu kita simpan kembali setelah Ramadhan berakhir dengan sholat Idul Fitri dan saling bermaaf-maafan sambil menikmati ketupat dan aneka jajanan.

Pertanyaannya kemudian, mampukah kita mengamalkan pesan-pesan moral, nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Ramadhan ke dalam kehidupan keseharian kita yang nota bene berada di tengah-

tengah gaya hidup yang konsumtif dan hedonistik ?, Mampukah kita mereformasi diri sendiri (sikap dan moral) yang lebih Islami ? Pinjam istilahnya pujangga Jawa Ki Ronggowsarito, bahwa *hidup di jaman edan itu jika tidak ikut edan bakal tidak akan kebagian*. Nah, apakah kita harus ikut edan, terus bagaimana kalau kita tidak kebagian ??? Yang jelas bulan ramadhan telah kita tinggalkan bersama. Kita telah melaksanakannya semua atau sebagian kecil ritual Ramadhan dengan penuh keikhlasan dan sabar, masalah pahala puasa kita serakahkan sepenuhnya kepada-Nya. Ini sesuai dengan firman-Nya yang artinya “*Puasa itu adalah milik-*

Ku . dan Aku yang paling berhak memberikan pahalanya”.

Selesai tarawih, saya menyempatkan diri untuk beriktikaf sambil mendengarkan orang tadarus, dalam diam saya berdo'a semoga diberi umur panjang agar bisa bertemu kembali dengan Ramadhan yang penuh rahmat dan maghfirah.



Nikmat juga ternyata berlama-lama di masjid pada malam kesembilan belas, mungkinkah saya telah bertemu dengan Lailatul Qodar ?. Saya pulang ketika menjelang sahur. ■
(Edi Basuki)

SAYA UCAPKAN SELAMAT DAN SEMOGA SUKSES ATAS JABATAN DAN TUGAS BARU...



KIRA-KIRA... APA RENCANA BAPAK. DALAM TUGAS KEPEMIMPINAN NANTI?



UTAMANYA... KONSOLIDASI KE DALAM, ORIENTASI PROGRAM, MEMBUAT STRATEGI KONSULTASI DAN IDENTIFIKASI...



TAPI PAK... HATI-HATI, JANGAN !! LUPA DIRI...



BAGAIMANA RENCANA ANDA?